



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 318/KEP/2024
TENTANG
KODE DOMAIN PETA PROSES BISNIS

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kode Domain Peta Proses Bisnis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KODE DOMAIN PETA PROSES BISNIS.

KESATU : Menetapkan kode domain peta proses bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kode domain peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun peta proses bisnis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 318/KEP/2024
TENTANG
KODE DOMAIN PETA PROSES BISNIS

I. REFERENSI PROSES BISNIS

1. RAB.01 PERTAHANAN DAN LUAR NEGERI
 - A. RAB.01.01 PERTAHANAN
 - RAB.01.01.01 STRATEGI PERTAHANAN
 - RAB.01.01.02 PERENCANAN PERTAHANAN
 - RAB.01.01.03 POTENSI PERTAHANAN
 - RAB.01.01.04 KEKUATAN PERTAHANAN
 - B. RAB.01.02 URUSAN LUAR NEGERI
 - RAB.01.02.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI
 - RAB.01.02.02 HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
 - RAB.01.02.03 INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK
 - RAB.01.02.04 PROTOKOL DAN KONSULER
 - RAB.01.02.05 PELINDUNGAN WNI
 - RAB.01.02.06 FASILITAS DIPLOMATIK
2. RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
 - A. RAB.02.01 INDUSTRI
 - RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
 - RAB.02.01.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0
 - RAB.02.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI
 - RAB.02.01.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI
 - RAB.02.01.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
 - RAB.02.01.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI
 - RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF

B. RAB.02.02 PERDAGANGAN

- RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
- RAB.02.02.02 PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
- RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
- RAB.02.02.04 OPTIMALISASI AKSES PASAR INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI PERDAGANGAN
- RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
- RAB.02.02.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK
- RAB.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN

C. RAB.02.03 PERTANIAN

- RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN
- RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
- RAB.02.03.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

- RAB.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
- RAB.02.03.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA
- RAB.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
- RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
- RAB.02.03.17 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- RAB.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
- RAB.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN
- RAB.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN
- RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
- RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN
- RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

D. RAB.02.04 PERKEBUNAN

- RAB.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.07 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.08 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PERKEBUNAN
- RAB.02.04.10 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PERKEBUNAN

- RAB.02.04.11 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PERKEBUNAN

E. RAB.02.05 PETERNAKAN

- RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK
- RAB.02.05.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN
- RAB.02.05.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
- RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
- RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- RAB.02.05.06 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PETERNAKAN
- RAB.02.05.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
- RAB.02.05.08 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
- RAB.02.05.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS PETERNAKAN
- RAB.02.05.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN PETERNAKAN
- RAB.02.05.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN
- RAB.02.05.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN
- RAB.02.05.13 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PETERNAKAN

F. RAB.02.06 PERIKANAN

- RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
- RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
- RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
- RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

G. RAB.02.07 BADAN USAHA MILIK NEGARA

- RAB.02.07.01 PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
- RAB.02.07.02 INISIATIF BISNIS STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
- RAB.02.07.03 PENGUATAN DAYA SAING DAN SINERGI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- RAB.02.07.04 PENGUATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.05 PENCIPTAAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.06 RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.07 PENGELOLAAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.08 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.09 TEKNOLOGI DAN INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.10 KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.11 MANAJEMEN RISIKO BADAN USAHA MILIK NEGARA
 - RAB.02.07.12 PENGELOLAAN BADAN USAHA KAWASAN
- H. RAB.02.08 INVESTASI
- RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 - RAB.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
 - RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - RAB.02.08.05 HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
 - RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
- I. RAB.02.09 KOPERASI
- RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
 - RAB.02.09.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI
 - RAB.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
 - RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
- J. RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
- RAB.02.10.01 USAHA MIKRO
 - RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 - RAB.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN
- K. RAB.02.11 PARIWISATA
- RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

- RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
- RAB.02.11.03 INDUSTRI PARIWISATA
- RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA
- RAB.02.11.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS)
- RAB.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA

3. RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

A. RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM

- RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
- RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
- RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
- RAB.03.01.04 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
- RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR

B. RAB.03.02 TRANSMIGRASI

- RAB.03.02.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI
- RAB.03.02.02 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JARINGAN KONEKTIVITAS INTRA KAWASAN TRANSMIGRASI, DAN ANTARA KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN KAWASAN SEKITAR
- RAB.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
- RAB.03.02.04 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
- RAB.03.02.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
- RAB.03.02.06 FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
- RAB.03.02.07 FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI

C. RAB.03.03 TRANSPORTASI

- RAB.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
- RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
- RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
- RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
- RAB.03.03.05 PENGELOLAAN SDM TRANSPORTASI
- RAB.03.03.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
- RAB.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

D. RAB.03.04 PERUMAHAN

- RAB.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
- RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
- RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS
- RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

E. RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL

- RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
- RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
- RAB.03.05.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
- RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
- RAB.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
- RAB.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
- RAB.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

- RAB.03.05.08 PENYERASIAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH KHUSUS
 - RAB.03.05.09 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
 - RAB.03.05.10 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAERAH TERTINGGAL
 - RAB.03.05.11 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL
 - RAB.03.05.12 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DAERAH TERTINGGAL
 - RAB.03.05.13 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH TERTINGGAL
 - RAB.03.05.14 PENYERASIAN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS
- F. RAB.03.06 PERTANAHAN
- RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG
 - RAB.03.06.02 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG
 - RAB.03.06.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG
 - RAB.03.06.04 PENYELENGGARA REFORMA AGRARIA
 - RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
 - RAB.03.06.06 PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN
 - RAB.03.06.07 PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN RUANG
 - RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
 - RAB.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN
- G. RAB.03.07 KEPENDUDUKAN
- RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
 - RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
 - RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA
 - RAB.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT

- RAB.03.07.05 PENDATAAN KELUARGA

4. RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN

A. RAB.04.01 KESEHATAN

- RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- RAB.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN
- RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
- RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
- RAB.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
- RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
- RAB.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
- RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

B. RAB.04.02 SOSIAL

- RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
- RAB.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
- RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
- RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
- RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
- RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

C. RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
- RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK
- RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
- RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.

5. RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN

A. RAB.05.01 HUKUM

- RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- RAB.05.01.03 PEMASYARAKATAN
- RAB.05.01.04 KEIMIGRASIAN
- RAB.05.01.05 PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
- RAB.05.01.06 PENYIDIKAN
- RAB.05.01.07 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- RAB.05.01.08 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT
- RAB.05.01.09 PERADILAN
- RAB.05.01.10 PENUNTUTAN

B. RAB.05.02 KEAMANAN

- RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
- RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM
- RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
- RAB.05.02.04 PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN TERORISME

C. RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA

- RAB.05.03.01 PERLINDUNGAN HAM
- RAB.05.03.02 PEMAJUAN HAM
- RAB.05.03.03 PENEGAKAN HAM
- RAB.05.03.04 PEMENUHAN HAM

6. RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA

A. RAB.06.01 PENDIDIKAN

- RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
- RAB.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL
- RAB.06.01.04 PENDIDIKAN TINGGI
- RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN

- RAB.06.01.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
- B. RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
- RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
 - RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 - RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
 - RAB.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
 - RAB.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
- C. RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
- RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
 - RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
 - RAB.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI
- D. RAB.06.04 PEMUDA
- RAB.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
 - RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
- E. RAB.06.05 OLAHRAGA
- RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
 - RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
7. RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
- A. RAB.07.01 PERTAMBANGAN
- RAB.07.01.01 PENGELOLAAN MINYAK
 - RAB.07.01.02 PENGELOLAAN GAS BUMI
 - RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
 - RAB.07.01.04 PENGELOLAAN BATUBARA
 - RAB.07.01.05 PENGELOLAAN GEOLOGI
- B. RAB.07.02 ENERGI
- RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
 - RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
 - RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN

C. RAB.07.03 KEHUTANAN

- RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
- RAB.07.03.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
- RAB.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
- RAB.07.03.04 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI
- RAB.07.03.05 PENINGKATAN REHABILITASI HUTAN
- RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

D. RAB.07.04 KELAUTAN

- RAB.07.04.01 PENGELOLAAN LAUT
- RAB.07.04.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT
- RAB.07.04.03 PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
- RAB.07.04.04 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
- RAB.07.04.05 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
- RAB.07.04.06 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
- RAB.07.04.07 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN

E. RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP

- RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
- RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
- RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
- RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
- RAB.07.05.06 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
- RAB.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

8. RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA

A. RAB.08.01 AGAMA

- RAB.08.01.01 PEMAHAMAN DAN LAYANAN KEAGAMAAN
- RAB.08.01.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
- RAB.08.01.03 OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN
- RAB.08.01.04 PENJAMINAN PRODUK HALAL
- RAB.08.01.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
- RAB.08.01.06 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH
- RAB.08.01.07 PENINGKATAN AKSES, MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
- RAB.08.01.08 PENINGKATAN MUTU PESANTREN
- RAB.08.01.09 PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

B. RAB.08.02 KEBUDAYAAN

- RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
- RAB.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
- RAB.08.02.03 PERIZINAN KEBUDAYAAN
- RAB.08.02.04 PENGELOLAAN BANTUAN KEBUDAYAAN DAN KEBAHASAAN
- RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
- RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

9. RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM

A. RAB.09.01 DALAM NEGERI

- RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
- RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH
- RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
- RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
- RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
- RAB.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH
- RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

B. RAB.09.02 KEUANGAN

- RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
- RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
- RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
- RAB.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA
- RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
- RAB.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
- RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
- RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
- RAB.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN
- RAB.09.02.10 PENGELOLAAN FISKAL LAINNYA
- RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

C. RAB.09.03 INFORMASI

- RAB.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
- RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
- RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
- RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
- RAB.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL
- RAB.09.03.06 PENYIARAN RADIO PUBLIK
- RAB.09.03.07 PENYIARAN TELEVISI PUBLIK
- RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

D. RAB.09.04 KOMUNIKASI

- RAB.09.04.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
- RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

E. RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- RAB.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
- RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
- RAB.09.05.04 PRAKARSA STRATEGIS (ENABLER)

F. RAB.09.06 APARATUR NEGARA



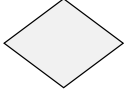


- RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
- RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
- RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

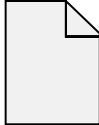

- RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
 - RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
 - RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
- G. RAB.09.07 KESEKRETARIATAN NEGARA
- RAB.09.07.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 - RAB.09.07.02 PEMBERIAN ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - RAB.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 - RAB.09.07.04 PENANGANAN PENETAPAN KEPUTUSAN DALAM KEWENANGAN PRESIDEN
 - RAB.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN
 - RAB.09.07.06 PENGENDALIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
 - RAB.09.07.07 PENGELOLAAN ISU STRATEGIS
 - RAB.09.07.08 PENGELOLAAN KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN
 - RAB.09.07.09 DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI KSP
 - RAB.09.07.10 DUKUNGAN MANAJEMEN KABINET KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - RAB.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

II. PETA PROSES BISNIS DENGAN BENTUK *BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)*

A. SIMBOL *BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)*

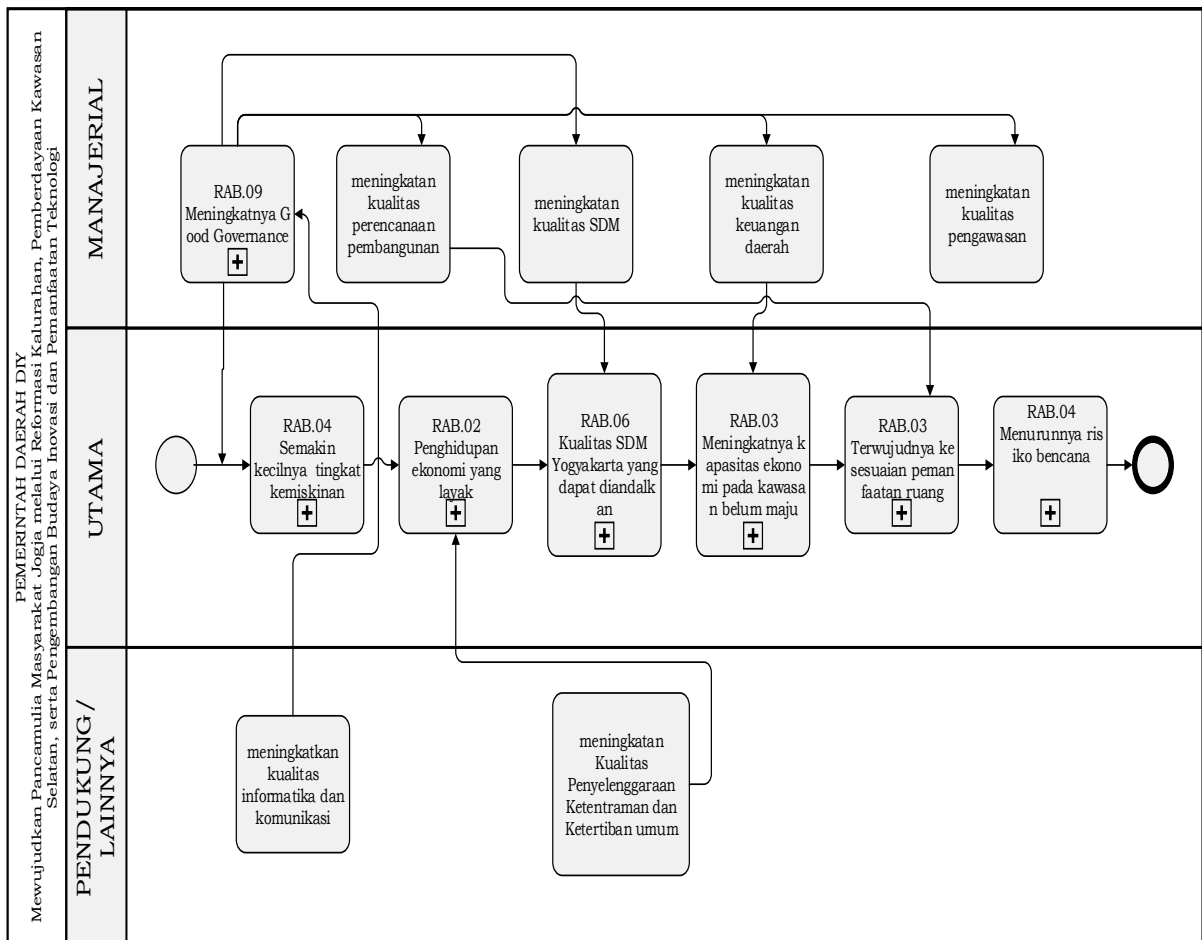
Simbol dasar BPMN adalah sebagai berikut:

Simbol	Nama Simbol	Keterangan
 <p>Start Intermediate End</p>	Event	sebuah event direpresentasikan dengan lingkaran. Events dapat berupa Start, Intermediate, atau End.
 <p>Task SubProcess</p>	Task/activity	merepresentasikan pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menghasilkan output tertentu.
	Gateway	sebuah gateway direpresentasikan dengan belah ketupat dan memperlihatkan pilihan yang berbeda.
	Sequence flow	digunakan untuk menunjukkan urutan yang kegiatan akan yang dilakukan dalam sebuah proses.
	<i>Pool dan Lane</i>	Digunakan sebagai representasi grafis dari pelaku/peserta kolaborasi. Dalam sebuah proses bisnis biasanya melibatkan beberapa aktor/role (participants).

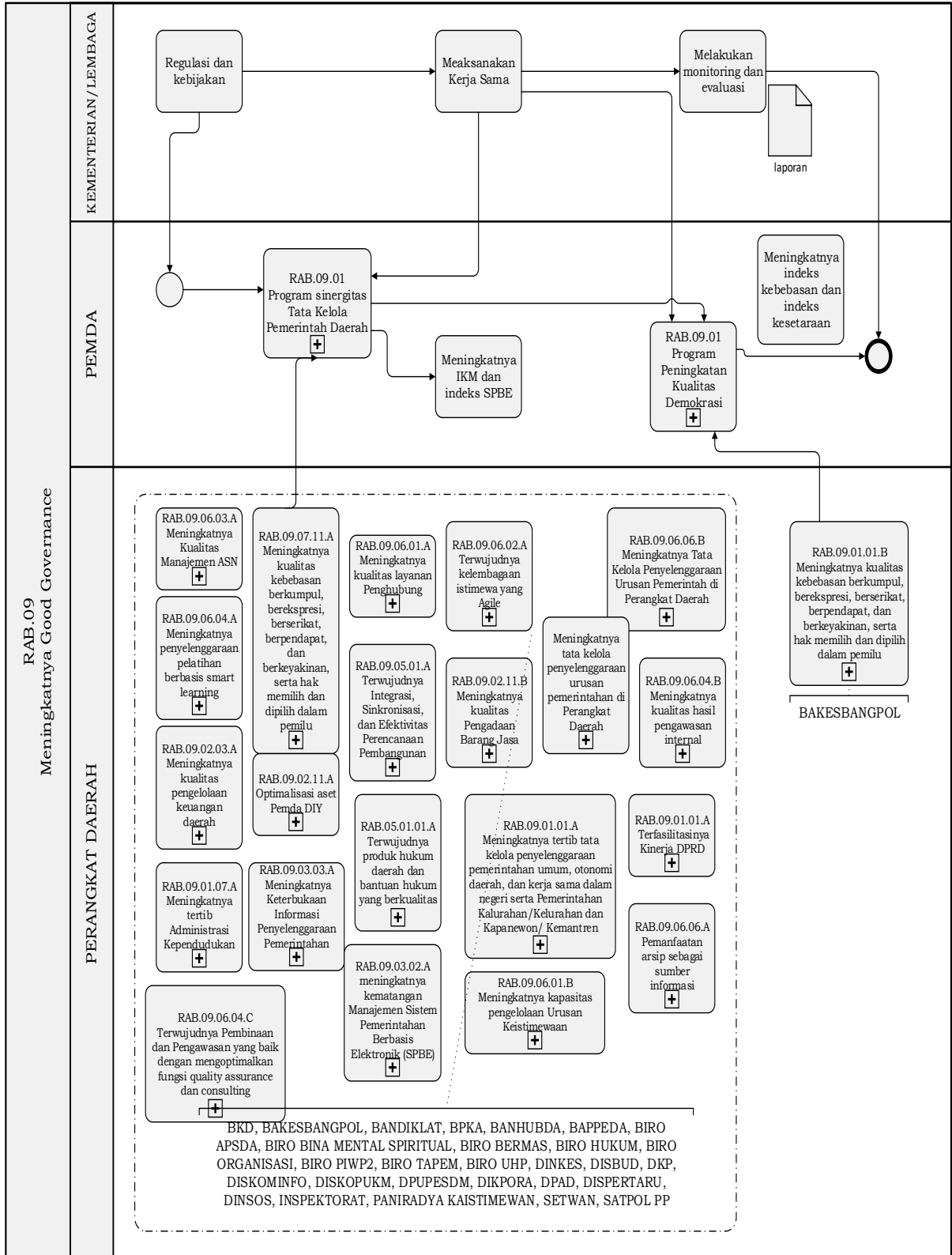
Simbol	Nama Simbol	Keterangan
	Data object	digunakan untuk menjelaskan data apa yang dibutuhkan dalam proses
	Group	untuk mengelompokkan sejumlah aktivitas didalam proses tanpa mempengaruhi proses yang sedang berjalan.

B. CONTOH PETA PROSES BISNIS

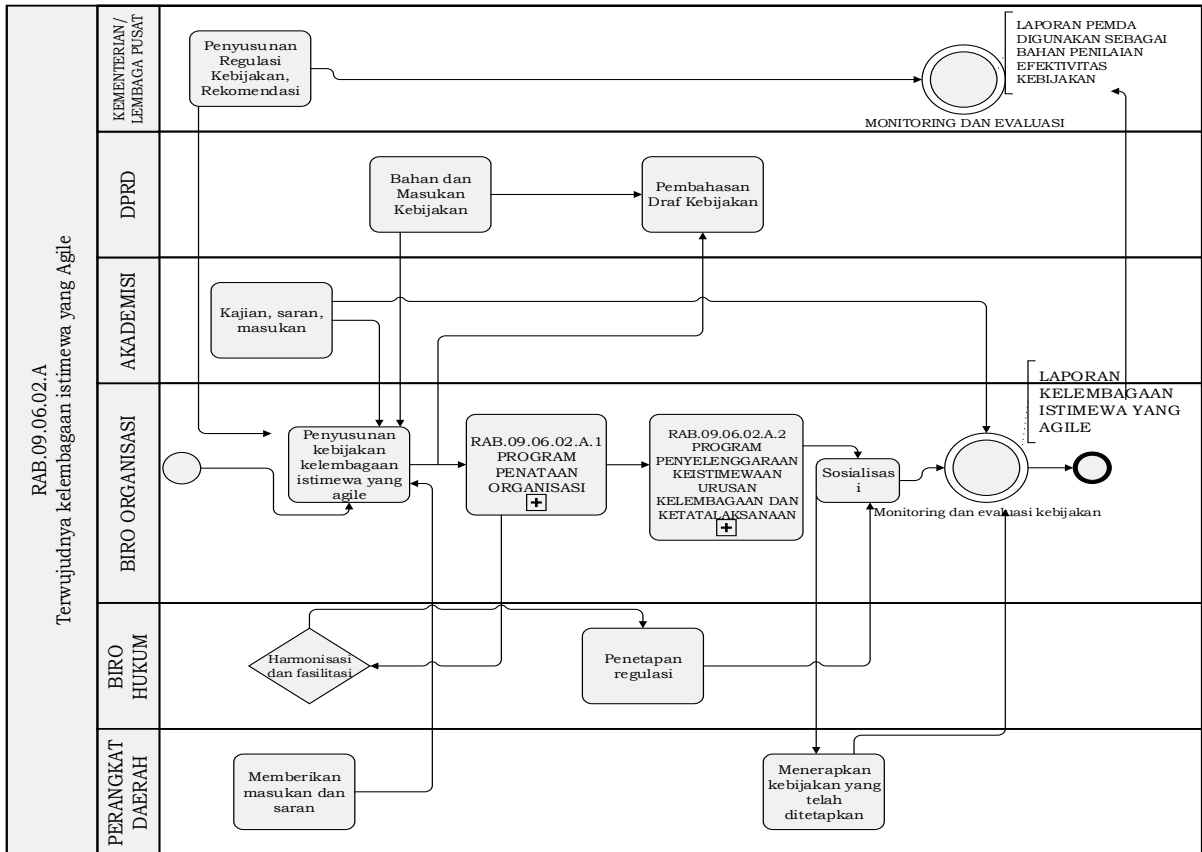
CONTOH PETA LEVEL 0



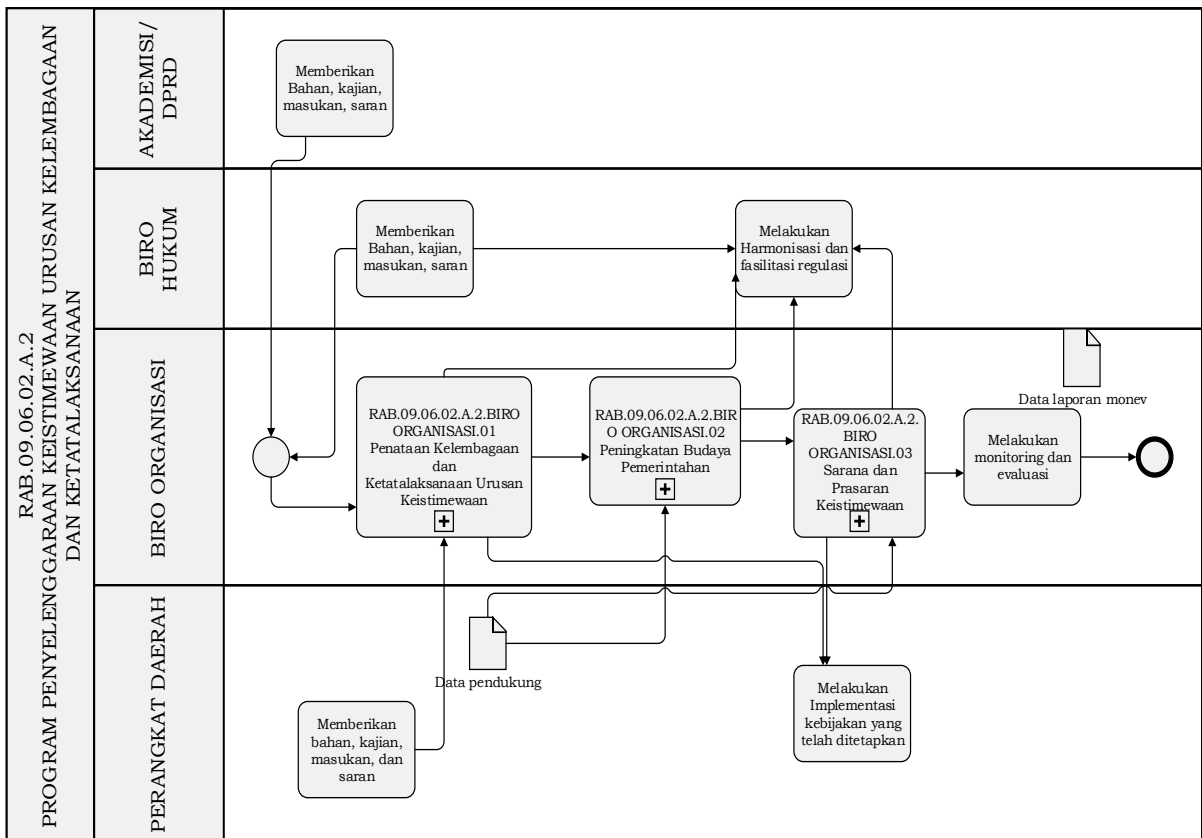
CONTOH PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



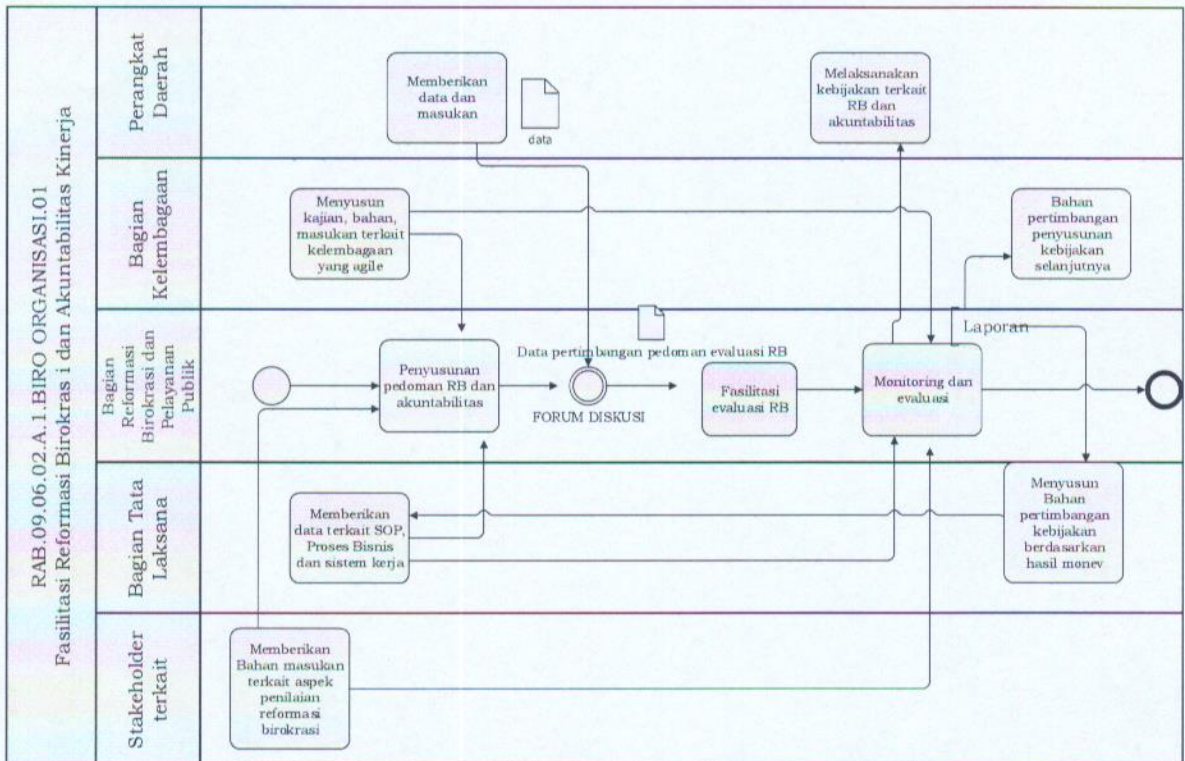
CONTOH PETA PROSES BISNIS LEVEL 2




CONTOH PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



CONTOH PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X